

## **ANALISIS VALUE FOR MONEY UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN INSTANSI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAMASA**

**Mariones<sup>1\*</sup>, Muhammad Azis<sup>2</sup>, Azwar Anwar<sup>3</sup>.**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

[\\*mariones018@gmail.com](mailto:*mariones018@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The aim of this research is to analyze the influence of the Value for Money (VFM) concept on measuring financial performance at the Population and Civil Registration Service of Mamasa Regency. By using this approach, this research focuses on evaluating the economic, efficiency and effectiveness aspects of budget management carried out by the agency. The research method used is a quantitative descriptive method, where data is collected through interviews and documentation. This research analyzes regional income and expenditure budget realization reports for the 2022-2023 period to measure financial performance based on ratios relevant to the VFM concept. The research results show that the economic level of the Population and Civil Registration Service of Mamasa Regency is in the economic category with a ratio of 62% in 2022 and increasing to 76% in 2023. However, the level of efficiency is still classified as less efficient, with a ratio of 91% in 2022 and increasing to 95% in 2023. Meanwhile, the level of effectiveness shows good results, with a ratio of 97% in 2022 and 98% by 2023. Overall, although performance in economic and effectiveness aspects shows good results, improvements in efficiency are still needed to maximize resource use.

**Keywords:** *Value for Money, Financial Performance, Efficiency, Effectiveness, Economical.*

### **PENDAHULUAN**

Kinerja instansi pemerintah saat ini menjadi sorotan masyarakat karena tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang mengalami kerugian. Masyarakat yang semakin kritis dengan bantuan teknologi menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan mengenai otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel (<https://peraturan.bpk.go.id>).

Sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja pemerintahan secara baik (Pratama, Alim dan Erwati, 2020). Hal ini sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik, dimana organisasi sektor publik seperti pemerintahan pusat dan daerah diharapkan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan. Unit unit kerja, pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghormati keinginan masyarakat sehingga terciptanya Good Governance (Pratama et al, 2020). *Value for money* (VFM) merupakan sebuah konsep dalam organisasi sektor publik yang mengacu pada apresiasi terhadap nilai uang. Pengukuran nilai uang merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dari kegiatan, program, atau organisasi. Penerapan konsep VFM bukan hanya tentang pengendalian biaya, namun memastikan bahwa seluruh belanja publik memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mamasa berupaya mengoptimalkan kualitas pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dalam menjalankan programnya dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang ingin di capai berdasarkan visi dan misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan dalam melaksanakan program kerjanya. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dinilai hanya dari aspek input dan output. Instansi ini dinilai cukup berhasil jika bisa menyerap anggaran 100% (input), dan melaksanakan program tahunan (output), tanpa ada penilaian terhadap aspek hasil (outcome), manfaat (benefit), dan juga dampak (impact). Oleh karena itu diperlukan ukuran nonfinansial dalam mengukur kinerja organisasi sektor publik (BPK, 2024).

Tahun Periode	Bidang	Anggaran Belanja (Rp)
2022	Kependudukan dan Catatan Sipil	2.812.567.000
2023	Kependudukan dan Catatan Sipil	3.138.381.800

Sumber: Didukcapil Mamasa 2024

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa total anggaran belanja pada tahun 2022 di berbagai bidang sebagai berikut kependudukan sebesar Rp.2.812.567.000, catatan sipil sebesar Rp. 938.205.000, pengelolaan informasi kependudukan sebesar Rp.918.205.000, data sebesar Rp. 18.000.000. Pada tahun 2023 total anggaran belanja diberbagai bidang sebagai berikut: kependudukan sebesar 1.553.381.800, catatan sipil sebesar Rp.1.285.000.000, pengelolaan informasi kependudukan sebesar Rp.285.000.000, data sebesar 15.000.000. dapat dilihat bahwa anggaran belanja yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tahun 2022-2023 secara keseluruhan mengalami peningkatan,

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai manfaat yang didapatkan terkait data dari segi pengukuran ekonomis, efisiensi dan efektifitas, dalam pencapaian tujuan program, pada pengelolaan anggaran terkhususnya pada anggaran belanja dimana dari data tersebut anggaran belanjanya mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023, dari segi ekonomisnya memberikan manfaat ekonomis jika digunakan untuk proyek yang meningkatkan produktifitas dan ekonomi jangka Panjang. Dari segi

efisiensi peningkatan ini dapat meningkatkan kapasitas dan skala operasional, namun harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi pemborosan. Sedangkan dari segi efektifitas, anggaran yang lebih besar dapat mempercepat pencapaian tujuan dan memperluas dampak program, asalkan pengelolaan tepat sasaran.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan daerah (Musthafa, 2020). Kinerja keuangan ini mencakup kemampuan dalam merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta bagaimana proses tersebut mendukung tercapainya tujuan pemerintahan yang baik (good governance).

### Anggaran Kinerja

Penganggaran dengan pendekatan kinerja merupakan penyempurnaan dari sistem penganggaran tradisional yang berfokus pada manajemen anggaran. Yaitu memperhatikan aspek ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan anggaran serta hasil fisik yang diperoleh (Sadat et al., 2020).

### Konsep *Value for Money*

Value for money merupakan bagian dari pengukuran kinerja untuk mengukur tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi yang dalam organisasi sektor publik sifatnya spesifik dan unik . Konsep value for money berbeda pengertiannya dengan konsep time value of money dalam akuntansi dan manajemen keuangan (Anwar, 2018).

### Pengukuran Ekonomis

Menurut Mardiasmo (2019), pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan (input) yang digunakan. Teknik untuk mengukur tingkat ekonomis adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### Pengukuran Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2019), pengukuran efisiensi dapat di ukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar output dibandingkan input maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Teknik untuk mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

### Pengukuran Efektifitas

Menurut Mardiasmo (2019), pengukuran efektifitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil yang diharapkan yaitu outcome, sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Teknik untuk mengukur tingkat efektifitas sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} \times 100\%$$

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif (*Descriptive Quantitative Analysis Method*) yang secara khusus menerapkan konsep *value for money* dalam analisis pengukuran kinerja Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa. dengan cara menganalisis unsur-unsur *value for money* dengan menghitung tingkat keekonomian, efisiensi, dan efektifitas dari data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode tahun 2022-2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, beberapa cara yang digunakan antara lain:

1. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dan catatan penting yang terkait dengan dengan *value for money* dalam mengukur kinerja kantor dinas tersebut, oleh karena itu diperlukan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan melakukan dialog secara langsung kepada pihak-pihak yang memberikan data dan informasi, dalam Teknik ini peneliti membutuhkan informasi Kepala subbagian keuangan dan perlengkapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Pengukuran Ekonomis

**Table 1.** Hasil Pengukuran Ekonomis

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	%
2022	1.756.350.000	2.378.800.000	62%
2023	2.378.800.000	3.138.381.800	76%

Sumber Data: Data Diolah 2025

Berdasarkan dari tabel pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa mendapat rasio ekonomi sebesar 62% yang termasuk dalam kategori ekonomis, sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan dengan persentase 76%, yang masih termasuk ke dalam kategori ekonomis.

Pengukuran Efisiensi

**Table 2.** Hasil Pengukuran Efisien

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	%
2022	1.756.350.000	1.933.851.341	91%
2023	2.378.800.000	2.505.735.881	95%

Sumber Data: Data Diolah 2025

Berdasarkan tabel 8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tahun 2022 mendapatkan rasio efisiensi sebesar 91% yang termasuk kedalam kategori kurang efisien. Selanjutnya pada tahun 2023 mengalami peningkatan tingkat efisiensi yang dimana mencapai angka persentase 95% dimana masuk dalam kategori kurang efisien.

Pengukuran Efektifitas

**Tabel 3.** Hasil Pengukuran Efektifitas

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Pendapatan	%
2022	1.756.350.000	1.805.613.400	97%
2023	2.378.800.000	2.430.720.000	98%

Sumber Data: Data Diolah 2025

Berdasarkan tabel 9 untuk tahun 2022 rasio efektivitas sebesar 97% yang termasuk kedalam kategori efektif. Pada tahun 2023 mendapatkan rasio efektivitas sebesar 98% yang termasuk kedalam kategori efektif. Adapun faktor utama terjadinya kenaikan persentase ini dalam pengukuran efektifitas adanya perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.

Pembahasan

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada periode tahun 2022-2023 dengan menggunakan konsep *value for money*. Konsep *value for money* ini terbagi atas tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan hasil analisis data, maka hasil pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengukuran Tingkat Ekonomis

Pengukuran kinerja menggunakan tingkat ekonomis menunjukkan bahwa penganggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dikatakan ekonomis karena dari tahun 2022 sampai pada tahun 2023 tingkat ekonomis berada pada persentase 60% - 80%. Semakin kecil persentase ekonomis maka kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinilai semakin baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa telah mengelola anggaran dengan cara yang ekonomis. Ekonomis dapat dilihat dari sejauh mana meminimalisir input primer yang berupa anggaran atau kas menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, fasilitas dan barang modal yang dikonsumsi untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa. Dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Pengukuran Tingkat Efisiensi

Pengukuran kinerja dengan tingkat efisiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tahun 2022 sebesar 91%, pada tahun 2023 hasil perhitungan mengalami peningkatan pada tingkatan efisiensi dengan nilai sebesar 95% yang masih tetap termasuk kategori kurang efisien. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022-2023 dikategorikan kurang efisien, karena dilihat dari hasil perhitungan yang mencapai kriteria penilaian tingkat efisiensi yaitu 90% - 100% yang dimana dikategorikan kurang

efisien. Adanya ketidak efisienan kinerja tersebut dikarenakan realisasi pendapatan pada tahun 2022 sampai 2023 lebih besar dari pada realisasi belanja hal ini menunjukkan tidak efisiennya kinerja di pemerintahan.

#### Pengukuran Tingkat Efektifitas

Pengukuran tingkat efektivitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tahun 2022 sebesar 97% sehingga termasuk ke dalam kategori efektif. Sedangkan Pada tahun 2023 mengalami peningkatan dalam efektivitas dengan nilai rasio efektivitas sebesar 98% yang masih dalam kategori efektif. Dilihat dari nilai persentase rasio efektivitas yang diperoleh terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa realisasi pendapatan yang dialokasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa ini lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendapatannya. Sehingga hasil yang dicapai yang diproksikan oleh realisasi pendapatan nilainya lebih kecil dari tujuan atau target yang ditetapkan yang diproksikan oleh alokasi pendapatannya.

#### Analisis Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan tiga indikator *Value For Money* dengan rasio selama periode penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomi konsisten dengan kriteria ekonomis. Untuk rasio efisiensinya menunjukkan hasil yang sangat tidak efisien. Sedangkan untuk rasio efektivitasnya, mengalami peningkatan setiap tahunnya namun masih dalam jangkauan yang baik yaitu efektif hingga sangat efektif. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu Muzafa (2022) dengan judul penelitian Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari segi rasio ekonomis pada tahun 2018 sampai 2020 sudah ekonomi karena mampu melakukan penghematan belanjanya sehingga realisasi masih dibawah anggaran belanjanya dengan nilai rata-rata persentase sebesar 90.16%. jika ditinjau dari segi rasio efesiensi pada tahun 2018 sampai 2020 tidak efisien dengan nilai rata-rata persentase sebesar 20,736,78% karena setiap tahunnya realisasi pendapatan yang berarti mengalami kerugian atau defisit secara terus menerus. Jika ditinjau dari segi efektifitas pada tahun 2018 sampai 2020 tidak efektif dengan nilai rata-rata persentase sebesar 54,46%, karena tidak mampu mengumpulkan pendapatannya sesuai dengan target yang ditetapkan.

#### **SIMPULAN**

Tingkat Ekonomis: Menunjukkan kinerja yang ekonomis dengan rasio ekonomi sebesar 62% pada tahun 2022 dan 76% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan baik dan efisien. Tingkat Efisiensi: Rasio efisiensi mengalami penurunan dari 91% pada tahun 2022 menjadi 95% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa masih tergolong tidak efisien dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai target yang diinginkan. Tingkat Efektivitas: Meskipun terjadi penurunan dari 97% pada tahun 2022 menjadi 98% pada tahun 2023, Akan tetapi masih berada dalam kategori sangat efektif, menunjukkan bahwa hasil yang dicapai mendekati dengan target yang ditetapkan.

## SARAN

Peningkatan Efisiensi: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penggunaan sumber daya untuk meningkatkan rasio efisiensi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi program yang tidak berjalan optimal dan melakukan penyesuaian anggaran yang lebih tepat.

Pelatihan dan Pengembangan SDM: Mengadakan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah.

Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara optimal dan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Pengembangan Sistem Informasi: Menerapkan sistem informasi yang lebih baik untuk pengelolaan data keuangan dan kinerja, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Marwah, R., Anwar, A., & Syachbrani, W. (2024). *Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dalam Mendukung Kinerja Pada Bawaslu Kota Makassar*. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.163>.
- Jabir, Muzafa. (2022). *Skripsi Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau*
- Manarung, A. dan Halomoan. S. (2018). *Analisis Laporan Keuangan (sektor swasta dan pemerintah daerah)*, Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Novitasari, M. E. I. (2021). Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Value For Money Sebagai Perwujudan Good Governance. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 15.
- Nurazizah. (2024). *Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada RSUD Labuang Baji Kota Makassar*.
- Romadhan, Siboro, Nuraliza & Hia, (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Value Money Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020-2022*. <https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i2.258>
- Sadat, Handayani, & Kurniawan, (2020). *Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Perusahaan Gas Negara Kantor-Cabang Palembang*, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/INOVATOR/index>
- Sofiani, M. (2020). *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Situmorang, D. R. (2020). *Kajian Mengenai Peran Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi*. *Jurnal Manajemen*, Volume 6 N, 65-74.
- Siti Patonah, I., Nilasari, Y., Patra Pertiwi, T., & Ekonomi, F. (2019). *Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa*.

### Buku

- Anwar, Muhammad, (2018). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi, (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* Jakarta: Salemba Empat.
- Musthafa, (2017). *Keuangan Manajemen*, Yogyakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Sarsiti. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Green Publisher Indonesia. <http://repo.unsa.ac.id>

#### Internet

BPK. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa NO 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id>

Presiden Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: DPR RI dan PRESIDEN RI*. From . <https://peraturan.bpk.go.id> diakses 8 oktober 2024.

#### Website

Prasetyo, Budi. (2023). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal BEA Dan CUKAI*. <https://www.beacukai.go.id>